

Trump Ancam Bombardir Moskow

Dari Halaman 1

Rekaman itu diperoleh oleh Josh Dawsey, Tyler Pager, dan Isaac Arnsdorf yang merinci beberapa percakapan dalam buku mereka, "2024".

Pada Selasa (8/7), Trump kembali mengungkap "frustrasinya" atas penolakan Putin terhadap perjanjian damai. Dia mengeluh pemimpin Rusia itu melontarkan "banyak omong kosong" kepada AS.
"Saya tidak senang dengan Putin. Saya sangat

tidak senang dengan mereka," ungkap Trump. Dalam kesempatan terpisah di masa penggalangan dana 2024 lalu, Trump juga membanggakan dirinya telah menekan sekutu-sekutunya untuk menyumbangkan puluhan juta dolar untuk kampanyenya.(cnni/js)

Muhri Fauzi Hafiz Surati Gubsu dan OJK RI

Dari Halaman 1

membatalkan hasil RUPS PT Bank Sumut beberapa waktu lalu. Sebab Agus Fatoni saat ini sudah ditetapkan sebagai Pj. Gubernur Papua. Keberatan tersebut pun sudah dilayangkan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara dan OJK RI.
"Sudah, sudah saya surati Pak Gub (Bobby Nasution) dan OJK," tegasnya, seraya menyebutkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menerangkan : "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," juga pada pasal 40 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Saya selaku masyarakat, Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Sumatera Utara

dan pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara periode 2014-2019, sangat keberatan, Bapak Agus Fatoni diangkat atau ditunjuk menjadi Komisaris PT. Bank Sumut, karena hal ini, sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik," tegas Muhri Fauzi Hafiz, yang juga sebagai Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) di Medan, Rabu (9/7/2025).
Ia menyebutkan, berdasarkan hal tersebut di atas, seyogianya dan selayaknya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Bank Sumut, dibatalkan serta diulang kembali. Sebab menurutnya, hal ini sangat tidak lazim dan melanggar prinsip konflik kepentingan serta tugas pokok kepala daerah.
"Dengan adanya rangkap jabatan ini, tentu-

nya juga bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintah yang baik. Sebagai salah satu pendukung Pak Bobby Nasution, baik sejak Pilkada dan saat ini, secara pribadi keberatan ini tidak memiliki kepentingan pribadi. Saya cuma ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peran masing-masing untuk mengawal jalannya Kepemimpinan Pak Bobby Nasution yang mengusung semangat kolaborasi, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumut, agar Sumut semakin berkah dan lebih baik lagi," Muhri Fauzi Hafiz, mengakhiri.
Sementara, dari hasil penelusuran wartawan, saat ini selain sebagai Komisaris PT Bank Sumut dan Pj. Gubernur Papua, ternyata jabatan mentereng Agus Fatoni juga adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.(A-10)

KPK Periksa Gubernur Jatim Hari Ini

Dari Halaman 1

keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara ini," katanya. Sebelumnya, KPK memanggil Khofifah untuk menjadi saksi kasus tersebut pada 20 Juni 2025.
Namun, Khofifah batal diperiksa penyidik KPK karena sedang berada di luar negeri untuk menghadiri wisuda anaknya.

Khofifah meminta penjadwalan ulang pada pekan depannya, yakni antara 23-26 Juni 2025. Akan tetapi, KPK belum memanggil Khofifah dalam rentang waktu tersebut. Sementara Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 Kusnadi, usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus tersebut pada 19 Juni 2025, mengatakan Khofifah seharusnya mengetahui proses pengelolaan dana hibah untuk pokmas di Pemprov Jatim tahun anggaran 2021-2022. Pada saat itu, Khofifah

menjabat sebagai Gubernur Jatim.
"Pasti tahu. Orang dia (Khofifah, red.) yang mengeluarkan (dana hibah, red.), masa dia enggak tahu," ujar Kusnadi.
Kusnadi lantas menjelaskan bahwa proses pengajuan dana hibah selalu dibicarakan antara DPRD dan Gubernur Jatim.
"Bukan kewenangan DPRD mengeksekusi anggaran itu. Yang mengeksekusi anggaran itu ya kepala daerah," katanya.(cnni/js)

Tim Jokowi Minta Disudahi Usai

Dari Halaman 1

hal itu tidak diatur dalam tahap penyelidikan. Meski begitu, ia memastikan pihaknya tetap menghormati dan siap mengikuti gelar perkara khusus yang diminta oleh pihak pelapor yakni Tim Pembela Ulama dan Aktivistis (TPUA).
Hanya saja, Yakup meminta setelah gelar perkara khusus rampung, tidak ada lagi perdebatan terhadap keaslian ijazah UGM milik Jokowi.
"Inikan gelar perkara khusus atas permintaan mereka sehingga setelah gelar perkara khusus ini harapan kami sudah makin jelas, klar dan pihak mereka tidak ada lagi dipertanyakan," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (9/7).

"Kami komitmen apapun hasilnya harus kami hormati. Harapan kami pihak sana sebagai WNI taat hukum, yang semua prosesnya harus sesuai koridor hukum juga harus mentaati gelar perkara nanti," imbuhnya.
Bareskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara khusus di kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivistis (TPUA).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan gelar perkara khusus akan dilakukan Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) terhadap hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
"Memohon penjadwalan ulang gelar perkara khusus, sampai mereka mendapatkan kepastian

atas nama-nama yang dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dimaksud," ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (3/7).
Sebelumnya, polisi telah rampung melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dilaporkan TPUA. Hasilnya, polisi menilai bahwa ijazah Jokowi di SMAN 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM asli. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kasus itu dan penyelidikan dihentikan.
Selama proses penyelidikan, polisi mengaku telah meminta keterangan dari total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi. Selain itu, polisi juga sudah melakukan uji laboratorium forensik terhadap berbagai dokumen.(cnni/js)

Kejagung Sita 72 Mobil dari Gedung Sritex

Dari Halaman 1

merupakan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT BJB, PT Bank DKI, dan BPD Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk dan entitas anak usaha.
"Kegiatan penyitaan tersebut dilakukan dengan alasan benda atau surat yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, dilansir dari Antara.

Selain itu dikatakan mobil yang disita diduga hasil tindak pidana, berkaitan dengan tindak pidana, serta berada dalam penguasaan tersangka atau pihak lain sepanjang relevan dengan perkara.
Sejumlah 10 mobil saat ini ditiptikan di Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang guna diamankan, dipelihara dan dikelola. Sementara 62 mobil lainnya ditiptikan di Gedung Sritex 2, Sukoharjo.
"Dijaga oleh 10 anggota TNI dan pegawai pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo selagi proses pencarian tempat yang aman dan memadai," kata

Harli.
Penyidik juga sebelumnya sudah menggeledah rumah Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dan Kantor PT Sritex yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Kejagung sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) tahun 2020 DS (Dicky Syahbandinata), Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020 ZM (Zainuddin Mappa) dan Direktur Utama PT Sritex pada tahun 2005-2022 ISL (Iwan Setiawan Lukminto).(ant/js)

Gibran Siap Urus Persoalan Papua

Dari Halaman 1

"Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di manapun, kapanpun dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya, kita siap," kata Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7).
Gibran mengatakan, walaupun Kepres soal itu belum keluar, ia mengaku sudah siap menjalankan tugas tersebut.
Ia menyebutkan, beberapa kali telah mengemukakan jajarannya dari Sekretariat Wakil Presiden bertolak ke Papua mengurus berbagai hal.
"Misalnya ke Sorong, ke Merauke, untuk

mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG," ucap dia.
Gibran menyampaikan hal ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan juga sudah dimulainya sejak era Wapres Ma'ruf Amin di periode sebelumnya.
Ia pun menyatakan siap melanjutkan kerja keras yang telah dimulai di era Ma'ruf tersebut.
"Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. kita dimanapun, kita jadikan kantor," ujarnya.
Gibran menekankan bahwa yang terpenting adalah harus sering berdialog dan menerima

aspirasi langsung dari masyarakat luas.
Ia mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi berjalannya pemerintahan.
Penunjukan wakil presiden untuk urusan Papua memang bukan hal baru. Pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin pada 2022 dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Ma'ruf ditugasi memimpin lembaga yang dirancang untuk memastikan kelanjutan program pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Saat itu Ma'ruf juga sempat berkantor di Papua selama lima hari pada Oktober 2023.(cnni/js)

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan

Dari Halaman 1

tidak mampu membayar gaji mereka. Anggota Komisi I DPR RI DPR RI Syamsu Rizal MI mengatakan, kesulitan keuangan perusahaan pers saat ini tak terlepas dari dampak meluasnya media sosial (medsos) yang aktif tanpa aturan namun juga menggerus ceruk pasar iklan yang selama ini diandalkan oleh perusahaan pers.
"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mesti bekerja sama dengan kementerian, maupun lembaga lainnya melihat masalah ini. Kehadiran platform medsos tanpa aturan itu secara tidak langsung mematikan industri media pers," ungkap Syamsu Rizal saat dikonfirmasi Rabu (9/7).
Syamsu mengatakan, kebebasan penggunaan medsos tanpa saringan dan aturan mengikat cenderung dimanfaatkan para pelakunya untuk mendapat keuntungan, bahkan mengabaikan prinsip etika informasi, apakah itu benar atau salah.
Selain bekerja sama dengan kementerian serta lembaga, kata pria disapa Deng Ical ini, Komdigi juga perlu melibatkan kampus atau perguruan tinggi bersama-sama menyusun platform digital agar bisa menyesuaikan dengan adab dan kultur Indonesia.

"Sebaiknya segera menyusun platform digital yang cocok untuk versi Indonesia. Tujuannya, supaya kita selain perlindungan data pribadi, juga membuat roadmap platform buatan Indonesia, dan 100 persen Indonesia," papar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menyarankan.
Berdasarkan hasil reses, Rizal mendapati fakta bahwa saat ini sudah banyak perusahaan pers yang merumahkan hingga memecat pekerja karena pihak perusahaan beralasan tidak mampu membayar gaji.
Kendala utamanya adalah, pendapatan iklan mereka telah diambil alih platform medsos maupun pelaku medsos. Hal ini menurutnya berdampak pada pers sebagai salah satu pilar demokrasi kehilangan peranan penting.
Ia tidak mengungkiri banyak media-media online yang tumbuh, namun tidak mampu bersaing karena kehadiran berbagai platform medsos yang aktif dan menjamur tanpa aturan jelas.
Dampaknya, media cetak, daring atau online, radio hingga televisi sekarang cakupannya sangat minim akibat arus informasi medsos tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya ingin mempercepat revisi aturan yang ada agar dilakukan pembaruan termasuk Undang-Undang Penyiaran,

Undang-Undang Pers serta Undang-undang terkait lainnya.
Hal senada telah disampaikan Anggota Komisi I DPR RI lainnya TB Hasanuddin yang menekankan agar kesejahteraan wartawan untuk segera diperhatikan, sebagaimana selama ini DPR RI juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan prajurit TNI.
"Seperti yang kita ketahui, Pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi. Tetapi bila ada masalah dalam dunia pers, maka itu menjadi kewajiban kita semua menyelesaikannya secara bersama-sama," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Komdigi, Dewan Pers, KPI, KIP di Kompleks Senayan RI.
Hasanuddin mengatakan, dunia pers sejauh ini didominasi pengusaha sebagai pemilik media. Kondisi tersebut menimbulkan irisan kuat ketimpangan antara kepentingan korporasi dengan kepentingan publik yang ujungnya berdampak pada kesejahteraan jurnalisnya.
Hasanuddin pun mengajak seluruh pemegang kepentingan, seperti pemerintah, DPR RI, serta industri media agar duduk bersama mencari solusi konkret demi meningkatkan kesejahteraan hidup maupun perlindungan bagi seluruh insan pers di Indonesia.(ant/js)

Diduga Terjadi

Dari Halaman 1

namun tetap lolos seleksi hingga pengangkatan. "Ini bukan soal iri atau tidak lolos. Ini soal keadilan dan prosedur. Kalau sudah begini, siapa pun bisa bertanya: apakah ini P3K atau P3Anak?" ujar salah satu peserta seleksi yang enggan disebut namanya.
Kepala Kepegawaian Kemenag Medan, MY yang dikonfirmasi awak media, Rabu (9/7) menuturkan, kabar dugaan praktik nepotisme tersebut tidak benar. Sebab, katanya, semua yang masuk PPPK Kemenag sudah melalui prosedur.
"Anak ini sudah lama honor dan terdata di BKN, aktif bekerja, ikut ujian, semua prosedur mekanisme penerimaan, mulai dari pendataan di portal PDM Kemenag dan di BKN sampai semua rangkaian seleksi CAT di BKN, Ujian SKTT PPPK, semua diikuti. Tidak ada yang melewati, semua berjalan sesuai prosedur dari BKN. Dan semua tahapan proses itu melampirkan berkas pendaftaran yang asli dan lengkap," sahutnya.(A-10)



Hidayah Tarif 32 % Dari Amerika Sebagai Tantangan

Dari Halaman 1

sekadar tantangan ekonomi, tapi juga ujian diplomasi dan strategi industri jangka panjang.
Tarif 32% ini bukan datang tiba-tiba. Beberapa pengamat melihatnya sebagai respons terhadap surplus perdagangan Indonesia dengan AS, serta sebagai bagian dari strategi Donald Trump—yang kini kembali ke tampuk kekuasaan—untuk memperketat neraca perdagangan Amerika dan memprioritaskan manufaktur dalam negerinya. Indonesia, yang selama ini menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari AS, kini kehilangan sebagian keistimewaan tersebut. Produk-produk seperti tekstil, alas kaki, dan produk karet akan terdampak langsung.
Tarif setinggi ini jelas akan membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar AS. Biaya tambahan sebesar 32% kemungkinan akan dibebankan pada konsumen, yang berpotensi membuat pembeli di Amerika beralih ke produk dari negara lain yang lebih murah, seperti Vietnam atau Meksiko.
Selain itu, UKM Indonesia yang mulai menembus pasar ekspor ke AS melalui platform digital akan menghadapi hambatan baru. Tarif tinggi bisa menjadi penghalang besar bagi upaya go global yang selama ini didorong oleh pemerintah. Akibatnya, lapangan kerja dalam negeri juga terancam, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan manufaktur ringan.
Tak hanya sektor riil yang terimbas. Pasar finansial juga bisa bereaksi negatif, dengan potensi melemahnya nilai tukar rupiah akibat tekanan pada neraca perdagangan. Kondisi ini tentu akan menekan daya beli domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Namun demikian, tidak semua sisi dari kebijakan ini gelap. Di balik tekanan tarif, terselip peluang untuk mempercepat transformasi struktural industri dalam negeri. Indonesia selama ini terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk berbiaya murah. Tarif ini bisa menjadi "tamparan" yang memaksa kita meningkatkan nilai tambah produk ekspor, memperkuat branding, dan mendorong diversifikasi pasar ekspor, termasuk ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan.
Lebih jauh, ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak bisa terlalu mengandalkan satu pasar. Pasar AS memang besar, tapi sangat fluktuatif secara politik. Dengan memperluas pasar ke kawasan ASEAN, Tiongkok, India, dan Timur Tengah, Indonesia bisa memperkuat ketahanan dagangnya. Strategi diplomasi ekonomi juga harus lebih proaktif dalam menyusun skema dagang bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan.
Pemerintah Indonesia tampaknya tidak tinggal diam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan langkah-langkah diplomatik dan negosiasi. Delegasi perdagangan ke Washington sedang dirancang, dan opsi pelonggaran kebijakan impor terhadap produk AS juga dipertimbangkan sebagai bagian dari kompromi bilateral.
Namun, respons kita tak cukup hanya reaktif dan diplomatik. Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat reformasi birokrasi ekspor-impor. Salah satu strategi yang kini dibahas adalah penguatan regulasi dan perizinan ekspor agar pelaku usaha tidak terjebak dalam prosedur yang berbelit. Selain itu, insentif fiskal dan pembiayaan untuk sektor manufaktur ekspor juga harus diperkuat.
Pemerintah juga harus mulai menyusun skema perlindungan dan restrukturisasi bagi industri terdampak, terutama UMKM yang belum siap menghadapi fluktuasi tarif global. Langkah ini penting agar kebijakan luar negeri negara lain tidak serta merta mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
Tarif 32% ini bisa dibaca sebagai cambuk untuk membebaskan diri dari "zona nyaman" dagang yang selama ini terlalu bergantung pada pasar besar seperti AS dan Tiongkok. Indonesia perlu mengembangkan ekosistem industri yang inovatif, berbasis teknologi, dan berorientasi global. Dengan kata lain, kita harus mulai berpikir sebagai negara industri, bukan sekadar eksportir bahan baku atau produk murah.
Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset sangat dibutuhkan. Transformasi industri tidak bisa diserahkan pada pasar semata. Perlu visi jangka panjang dan dukungan regulasi yang kuat, agar Indonesia tidak hanya bertahan di tengah gejolak dagang global, tetapi tumbuh menjadi pemain utama di kancah perdagangan internasional.
Tarif 32% dari AS memang menyakitkan, tetapi bisa menjadi titik balik. Seperti kata pepatah, "di balik krisis, ada kesempatan." Dengan strategi diplomasi cerdas dan reformasi struktural yang berani, Indonesia bukan hanya bisa menghadapi tantangan ini, tetapi juga memanfaatkannya untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Kini saatnya Indonesia berpindah dari status negara pengikut, menjadi negara penentu dalam perdagangan global.